

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Coping with Physical Environment: The Case Studies of Low-Income Housing in Jakarta Sri Astuti Indriyati.....	257–268
Membuka Diri Setengah Hati: Ruang Keterlibatan Warga dalam Penyusunan APBD Bowo Sugiarto	269–276
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Diplomasi Indonesia dengan Tiga Negara ASEAN Peni Hanggarini & Retno Hendrowati	277–285
Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik Syarifuddin Iskandar Ardiansyah	286–292
Penanganan Keluhan Publik pada Birokrasi Dinas Perijinan Suryadi	293–303
Cerita Rakyat di Pulau Mandangin: Kajian Struktural Antropologi Claude Lévi Strauss Suhartono, Bambang Yulianto & Anas Ahmadi	304–311
Isu Ras dan Warna Kulit dalam Konstruksi Kecantikan Ideal Perempuan Ratih Puspa	312–323
Employees as the ‘Actor’ in Communicating the New Corporate Identity Nurul Ratna Sari	324–329
Karakter Maskulin Pemerintahan Bush Edi Dwi Riyanto	330–335

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Diplomasi Indonesia dengan Tiga Negara ASEAN

Peni Hanggarini¹ & Retno Hendrowati²

1) Program Studi Hubungan Internasional & Program Studi Teknologi Informasi

2) Fakultas Falsafah dan Peradaban & Fakultas Rekayasa & Teknologi, Universitas Paramadina

ABSTRACT

The role of Information Technology and Communication (ICT) was increasingly significant to the attainment of the goals of diplomacy. However, there were limited studies on how ICT affected Indonesia's diplomacy. Therefore, this study analyzed how Indonesia's Ministry of Foreign Affairs had benefited from the information technology and communication in conducting its diplomacy toward three member states of Association of Southeast Asian Nations. The method of this research was descriptive analytical based on literary studies and interview. The study concluded that Indonesia had attempted to implement policy, formulate planning and implement the application, and establish infrastructure of the information technology and communication for its diplomacy. One of the instruments was through establishing integrated web portal. However, some recommendations needed to be raised in order to reap more benefits from the information technology and communication for Indonesia's diplomacy in the future.

Key words: *information technology and communication, Indonesia's diplomacy, member states of Association of Southeast Asian Nations*

Perkembangan praktik diplomasi sangat ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seperti halnya tertuang dalam sejarah diplomasi, instrumen diplomasi di abad ke-18 tergolong sangat sederhana apabila dibandingkan dengan instrumen diplomasi yang kini digunakan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Di masa itu, hubungan korespondensi antar negara menggunakan surat yang dikirim oleh seorang pembawa pesan (*messenger*) yang menaiki kuda. Di abad 20 ini, penyampaian pesan antar kepala negara dapat dilakukan dalam waktu yang singkat (*instant*) dengan bantuan media elektronik misalnya melalui *e-mail* dan kontak langsung dengan *mobile phone*.

Komunikasi yang terjalin dengan dukungan kecanggihan teknologi tentu mempermudah pemeliharaan hubungan baik antara kedua negara. Namun, sebagaimana konflik dan damai merupakan dua sisi dari satu koin mata uang maka konflik pun tidak pelak dapat terjadi karena terlalu dekatnya hubungan antarnegara. Bahkan, potensi konflik dapat muncul karena kecanggihan teknologi memungkinkan suatu negara dapat mengetahui rahasia negara lain. Bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan atau intervensi tentu tidak dapat tertahankan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mencermati pemanfaatan teknologi informasi dalam diplomasinya karena dapat memberikan dampak positif bagi upaya perjuangan kepentingan nasional di tingkat internasional. Namun, di sisi lain, Indonesia perlu pula mewaspadai dampak negatif yang dapat muncul akibat dari pemanfaatan teknologi informasi dalam diplomasi Indonesia maupun diplomasi yang dilakukan oleh negara lain terutama negara-negara yang maju dalam hal teknologi.

Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia memulai gerakan berbasis teknologi informasi. Sejak saat itu, hampir seluruh kegiatan masyarakat sehari-hari membutuhkan peran teknologi informasi, termasuk kegiatan bisnis dan pemerintahan. Dalam arah dan kebijakan politik misalnya yang terkait dengan komunikasi, informasi, dan media massa telah dibahas oleh Pemerintah sejak tahun 1999. Dalam pembahasan tersebut terdapat beberapa petunjuk tentang arah dan kebijakan yang harus ditempuh oleh pengelolaan informasi nasional, di antaranya untuk: 1) Meningkatkan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, membentuk kepribadian

1 Korespondensi: P. Hanggarini, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto Kav 97, Mampang, Jakarta Selatan 12790, e-mail: peni.hanggarini@paramadina.ac.id atau peni_hanggarini@hotmail.com

bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; 2) Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global.

Kekuatan sebuah informasi jauh lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan angkatan bersenjata manapun di dunia. Secara umum, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup nasional mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; 2) Meningkatkan daya saing bangsa; 3) Memperkuat kesatuan dan persatuan nasional; 4) Mewujudkan pemerintahan yang transparan; dan 5) Meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional (Kominfo 2006).

Sesuai dengan pendapat Sofyan Djalil (Sekretariat Negara 2007) “Perkembangan TIK menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antarnegara dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan TIK mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau *knowledge-based society*.”

Adapun manfaat keberadaan TIK bagi bangsa Indonesia diharapkan adalah: 1) Mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi; 2) Mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur; 3) Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan; 4) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*human capacity building*); 5) Mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi; dan 6) Membentuk masyarakat informasi (*knowledge-based society*).

Pemahaman masyarakat (publik) sebagai salah satu aktor dalam diplomasi Indonesia yaitu aktor kesembilan dalam *multi track diplomacy* dalam pemanfaatan TIK merupakan hal penting. Publik adalah bagian dari lapisan terluar (lapisan kesembilan) dari *multi track diplomacy*. Publik dapat pula mendukung pemanfaatan teknologi informasi misalnya dalam diplomasi yang dilakukan di dunia maya.

Penggunaan TIK dapat mengurangi bahkan menghilangkan pula persepsi buruk publik terhadap kehandalan diplik. Kemlu masih dianggap kurang mampu oleh publik dalam hal membangun konsituten diplomasi dengan bekerja sama dan merangkul semua pemangku kepentingan hubungan luar negeri

dalam wujud *multitrack diplomacy*. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan yang tinggi antara harap publik dengan prioritas arah diplik (diplomasi publik). Di satu sisi Kemlu cenderung berperan sebagai media sosialisasi dari aktivitas dan kebijakan diplomasi serta politik luar negeri. Di sisi lain, publik justru menginginkan pelibatan aktif dari berbagai elemen multi jalur dalam pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi (Sugiarto & Hanggarini, 2010).

Untuk menunjang kinerja multi jalur diplomasi, maka pada akhir tahun 2007 Kemlu RI membuat portal yang mengintegrasikan setiap perwakilan RI di seluruh dunia. Ini juga merupakan suatu jawaban terhadap kekurangan atau tantangan pelaksanaan diplomasi publik yang sebelumnya ditujukan publik terhadap Kemlu RI.

Pemanfaatan TIK di Kementerian Luar Negeri telah dicanangkan sejak tahun 2000, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI dalam pidatonya pada hari ulang tahun ke-55 Kemlu, yaitu petikannya: (missions.itu.int~indonesi.news/hut.htm)

“Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah mendorong terjadinya arus globalisasi di segala bidang, termasuk bidang Politik dan Hubungan Internasional, Kementerian Luar Negeri sejak awal Pelita VI telah meletakkan landasan kebijaksanaan pembangunan sistem informasi dan telekomunikasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21 di mana informasi akan memegang peran yang dominan dalam lingkup kegiatan diplomasi dan hubungan luar negeri.

Untuk mendukung pengembangan konsep Sistem Informasi Terpadu dengan cakupan operasional yang bersifat global, disamping memanfaatkan jaringan komunikasi publik, Kementerian Luar Negeri perlu membangun suatu jaringan komunikasi khusus. Jaringan komunikasi khusus ini diperlukan untuk distribusi informasi diplomatik yang bukan saja bersifat taktis atau strategis tetapi juga berklasifikasi terbatas/rahasia yang tidak mungkin disalurkan melalui sarana komunikasi publik.”

Selain itu, Kemlu RI (<http://www.Kemlu.go.id/>) juga mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri perlu membuka wawasan bahwa TIK telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat untuk dimanfaatkan dalam menunjang tugas-tugas Kemlu dan Perwakilan RI.

Agar terdapat pemahaman yang menyeluruh atas persepsi masyarakat (publik) terhadap pentingnya pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI serta pemahaman sejauh mana diplomasi Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu disusun suatu penelitian yang mengacu kepada pertanyaan utama sbb: Bagaimana Kementerian Luar Negeri RI telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap tiga negara anggota *Association of Southeast Asia Nations* (2008–2009)?

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam diplomasi Indonesia dan bagi Kemlu (Kemlu) sebagai masukan bagi peningkatan kinerja diplomasinya di masa mendatang serta memberikan rekomendasi terhadap peningkatan kinerja diplomasi Indonesia khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji keadaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara kualitatif dengan studi kasus pada Kementerian Luar Negeri RI. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) Pengkajian secara spesifik hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan TIK bagi suatu Departemen; 2) Perumusan informasi dari berbagai sumber yang akan dianalisis dan disusun dalam bentuk bahan pertanyaan; 3) Melakukan *indepth interview* berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti kepada narasumber terkait; 4) Menganalisis hasil wawancara secara induktif. Yaitu informasi dari hasil wawancara akan disusun secara spesifik untuk menyusun argumen yang bersifat umum dan menghubungkan dengan argumen-argumen dari sumber literatur terkait, dan 5) Merumuskan hasil analisis dan merekomendasi hasil penelitian, terutama untuk kepentingan diplomasi Kementrian Luar Negeri.

Dalam penelitian kualitatif ini, data yang akan dikumpulkan berbentuk kalimat atau narasi dari responden penelitian, kemudian akan dianalisis dan dioleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif sehingga dapat memberikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah wawancara dan studi dokumentasi/literatur. Dari 10 calon responden yang kami rencanakan, akhirnya peneliti hanya melakukan terhadap lima narasumber dari KBRI di tiga negara serta dua

perwakilan Direktorat yang berada di Kemlu RI, Jakarta. Hal ini dikarenakan kesibukan dari perwakilan direktorat Kemlu di beberapa negara sehingga merasa tidak ada waktu untuk dilakukan wawancara, juga alasan kerahasiaan informasi dari masing-masing perwakilan. Kelima narasumber tersebut adalah perwakilan Kemlu dari lima negara di Asia Tenggara yang direpresentasikan sebagai KBRI negara A, B, C, serta satu Biro dan Direktorat yang menangani Pengembangan Sistem Informasi Kemlu RI di Jakarta.

Teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana pertanyaan wawancara telah disusun. Proses tanya jawab dilakukan secara fleksibel namun masih terkendali pada tema wawancara. Selain wawancara langsung, sebagian narasumber (responden) memberikan jawaban dari pertanyaan wawancara melalui e-mail (surat elektronik). Hal ini terjadi karena tempat yang berjauhan antara narasumber dengan pewawancara. Penulis menyusun beberapa pertanyaan sebagai bahan wawancara berdasarkan pengelompokan perencanaan, kebijakan dan aturan, struktur organisasi dan penanggung jawab, dan aplikasi dan pemanfaatan TIK. Dari rencana sembilan perwakilan Kemlu, peneliti berhasil melakukan wawancara dengan lima perwakilan (55%) baik melalui e-mail atau pun wawancara langsung.

Hasil dan Pembahasan

Diplomasi merupakan suatu bentuk hubungan internasional yang dilakukan melalui negosiasi dan bukan melalui tindakan berdasarkan kekuatan. Kegiatan ini berkaitan dengan pengumpulan informasi yang menunjang pelaksanaan negosiasi. Berridge mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

Diplomacy is the conduct of international relations by negotiation rather than by force, propaganda, or recourse of law, and by other peaceful means such as gathering information or engendering goodwill which are either directly or indirectly designed to promote negotiation. (Berridge 1995:1)

Watson bahkan mengatakan bahwa dalam diplomasi dibutuhkan upaya menjaga kontak, hubungan komunikasi dan dialog serta menerapkan persuasi. Dengan kata lain, diplomasi membutuhkan keterampilan manusia (*human skills*) dan juga *judgements* (Neumann 2003:352).

Sistem diplomasi berawal pada abad XV di Italia ketika kedutaan atau perwakilan negara asing

pertama kali didirikan. Namun, Harold Nicholson beranggapan bahwa sistem diplomasi pertama kali justru diperkenalkan oleh Prancis sejak abad XVII dan XVIII karena menurutnya lebih banyak orang yang mempelajari diplomasi dari Prancis yang menuangkan karya dan pemikirannya tentang diplomasi (Berridge 1995:1–2)

Pada masa awal sistem diplomasi terlihat bahwa kegiatan diplomasi diibaratkan hanya seperti *living letter* di mana para diplomat seolah sekedar berperan sebagai penyampai pesan. Dalam perkembangannya muncul konsep bahwa para diplomat memiliki *full power* untuk bernegosiasi sebagai perwakilan negara asalnya. Yang dimaksud sebagai diplomat di antaranya pengacara, pedagang, dan konsul. Dengan adanya *power* yang dimiliki oleh para diplomat tersebut maka kemudian lahir konsep pendirian kantor perwakilan (*resident mission*) yang berfungsi sebagai peningkatan kegiatan diplomasi pada abad XV. Hingga sebelum Perang Dunia I, kegiatan diplomasi akhirnya dilakukan hanya terfokus pada diplomasi tingkat hubungan bilateral (Berridge 1995:2–3)

Namun setelah Perang Dunia II berakhir, kecenderungan diplomasi berubah ke arah multilateral. Bahkan dengan munculnya banyak negara yang mulai merdeka serta upaya peningkatan stabilitas keamanan di kawasanannya, maka kemudian muncul diplomasi regional. ASEAN merupakan salah satu contoh kerja sama regional yang menerapkan bentuk-bentuk diplomasi regional dan bilateral antara negara anggotanya sejak tahun pendiriannya pada 1967. Dengan kemajuan teknologi pada abad XXI yang memungkinkan hubungan antara negara yang berjauhan jaraknya menjadi terasa tak terbatas (*borderless*), maka kecenderungan diplomasi kini lebih ke arah trans regional. Contoh diplomasi lintas regional ini misalnya dalam konteks kerja sama Uni Eropa dengan ASEAN. Tampak jelas perbedaan pola diplomasi dapat terjadi karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pergeseran pola dari diplomasi tradisional dengan diplomasi yang modern. Bahkan di era modern, diplomasi pun mengenal konsep baru yaitu diplomasi publik.

Perbedaan utama antara diplomasi publik di era modern dengan diplomasi tradisional terletak pada bentuk interaksi. Pada diplomasi publik, interaksi yang terjadi adalah antara pemerintah dengan pemerintah (*government to government*). Sedangkan pada diplomasi publik memungkinkan interaksi antara pemerintah dengan publik asing yang berada di lokasi negara asing. Joseph Duffey, mantan Direktur

the United States Information Agency, mengutip definisi diplomasi publik yang diungkapkan oleh Hess & Kalb sebagai berikut:

An attempt to get over the heads or around diplomats and official spokesmen of countries and sometimes around the press to speak directly to the public in other countries and to provide an interpretation, explanation of U.S. values and policies (Hess & Kalb dalam Seib 2009: 773–774).

Berdasarkan pemahaman terhadap konsep diplomasi publik, maka terlihat bahwa terdapat interaksi antara individu dengan individu dalam diplomasi. Tentu saja diplomasi antarindividu ini tidak saja terjadi pada saat kondisi relatif damai, bahkan dalam kondisi relatif mengarah ke konflik pun, diplomasi antarindividu ini masih dapat diupayakan.

Salah satu contoh adalah diplomasi olahraga (*sport diplomacy*) yang dilakukan oleh masyarakat Korea Utara dengan Korea Selatan yang masih terlibat dalam intensitas konflik yang cukup tinggi meski akan mengarah kepada upaya reunifikasi Korea. Bentuk diplomasi antara lain dalam pengiriman delegasi kedua Korea pada Olimpiade Sydney 2000, Olimpiade Athena 2004, dan Olimpiade Winter Turin 2006. Pada kesempatan tersebut, kedua bendera negara dipakai, juga satu bendera lain yang digunakan sebagai pemersatu keduanya. Diplomasi ini mampu menunjukkan adanya inovasi pendekatan politik luar negeri Korea Selatan pada masa President Kim Dae-jung yang mengarah kepada *people-to-people contact* untuk kearah reunifikasi (Merkel 2008: 289–311).

Strategi diplomasi publik yang menggunakan kekuatan media dilakukan oleh Amerika Serikat. Misalnya, pada masa pemerintahan George W. Bush kedua, terlihat strategi diplomasi publik AS mengalami beberapa peningkatan di berbagai aspek. Diantaranya, AS menciptakan *Bureau of European and Eurasian Affairs in the U.S. Department of State*. Biro ini memiliki seorang *deputy assistant secretary* yang fokus mengurus masalah diplomasi publik. Instrumen diplomasi publik yang baru adalah dengan menggunakan media di Brussels, menerapkan *pre-active diplomacy*, serta menguraikan beberapa upaya agar diplomasi dapat dilakukan di luar *The Washington bubble*. Diplomasi *pre-active* adalah upaya untuk melakukan antisipasi suatu berita dan identifikasi cara untuk membuat berita sehingga diplomasi dapat dilakukan untuk menciptakan suatu berita yang bermakna positif bagi AS. Strategi ini

merupakan strategi yang kreatif memanfaatkan media guna menciptakan cara berpikir (*mind set*) yang diinginkan oleh Pemerintah AS. Langkah peningkatan penggunaan media antara dengan meningkatkan fungsi dari website kedutaan yang dapat memfasilitasi *podcasting*, *video streaming* serta upaya lain yang berorientasi visual (*visually oriented content*) yang juga diiringi dengan pelatihan, pengembangan *software* serta pendanaan pula bagi *hardware* (Graffy 2009:791–796).

Terlihat pergeseran besar dalam diplomasi AS terutama di masa sebelum dan sesudah peristiwa 9/11. Dalam menghadapi terorisme Internasional, Pemerintah AS tidak saja menggunakan pendekatan klasik yaitu dengan menggunakan kekuatan militer tetapi juga menggunakan *soft power*-nya. Dalam hal ini, AS melibatkan upaya untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat muslim dunia melalui diplomasinya. Dengan kata lain, diplomasi publik setelah 9/11 tidak lagi semata untuk melihat Islam sebagai musuh tetapi justru meningkatkan semangat persekutuan atau kesatuan. Konsep yang dikembangkan adalah untuk melemahkan kekuatan moral lawan, sementara itu meningkatkan semangat persekutuan (Van Ham 2003:427–444).

Meski diplomasi publik dapat berlangsung sangat luas dibandingkan dengan diplomasi tradisional, tetapi tetap perlu kiranya memperhatikan beberapa komponen penting dalam diplomasi di antaranya etika berdiplomasi. Meskipun penerima informasi dalam diplomasi adalah mereka yang tidak memiliki budaya yang sama dengan pengirim pesan namun tetapi standar kejujuran perlu dijaga. Dengan adanya gelombang global informasi, maka diplomasi publik menjadi semakin penting namun juga semakin menantang karena informasi harus dihantarkan tidak saja dengan cepat tetapi juga perlu mengindahkan etika kejujuran. Para diplomat atau pelaku diplomasi publik juga tetap harus menggunakan standar objektivitas dan ketepatan (*accuracy*) yang juga digunakan oleh para wartawan (Seib 2009: 773–784).

Dalam konteks diplomasi publik yang dijalankan oleh Amerika Serikat misalnya, dua target diplomasi publik telah ditetapkan untuk mendukung politik luar negeri sekaligus untuk menghasilkan pemahaman budaya AS yang lebih baik. Dutta-Bergman (2006) menguraikan bahwa:

public diplomacy, as defined in this section, is the effort of a nation-state to build an image with the public of another state. Because the goal of public diplomacy is to achieve communication between

nation-states, the discussion of public diplomacy is positioned in the backdrop of Habermas (1979, 1984, 1987) theory of communicative action, which provides guidelines for ethical communication between participants.

Sumber informasi dari internet juga berpartisipasi dalam memberikan masukan bagi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri. Publik juga dapat berpartisipasi dalam suatu opini dan tidak lagi sebagai partisipan pasif. Diplomasi pun dapat berjalan dengan baik. Namun dalam rangka menjaga privasi suatu negara atau seseorang dalam rangka hubungan luar negeri terdapat beberapa negara yang melarang keras terhadap pemuatan berita yang bernuansa kritik atau masukan kepada pemerintah.

Selain untuk kepentingan pemerintah, internet juga dapat berperan sebagai sarana diplomasi personal terhadap komunitas nasional atau pun internasional. Seperti yang terjadi pada saat kampanye Barrack Obama presiden AS. Dengan memanfaatkan situs, jejaring sosial, maka Barrack Obama menjadi dikenal oleh masyarakat AS dan dunia. Hal ini dirasa sangat efisien bagi seseorang untuk menyebarkan informasinya (kampanye program) kepada masyarakat luas.

Berkomunikasi dengan menggunakan e-mail dalam kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat RI sudah tidak dapat dielakkan lagi di era teknologi saat ini. Seorang diplomat di Perwakilan Tinggi RI di negara A misalnya, terbiasa menggunakan sekitar 6 e-mail perharinya untuk kepentingan pekerjaan. Sedangkan diplomat di KBRI negara B misalnya, menggunakan 50 e-mail perharinya untuk kegiatan yang terkait pekerjaannya. Namun di KBRI negara C, penggunaan e-mail dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari tidak tergolong besar jumlahnya. Komunikasi justru banyak dilakukan melalui faksimil.

Diplomat yang berada di salah satu Direktorat di Kemlu misalnya menggunakan sekitar 3–7 e-mail perhari dalam korespondensi pekerjaan. Namun diplomat yang berada di Pejambon menyatakan bahwa sekitar 50 e-mail dinas perhari. Selain fasilitas kantor, diplomat tersebut menggunakan *Blackberry* yang selalu dalam keadaan aktif. Apabila menerima pesan yang terkait urusan dinas, umumnya berita tersebut akan diforward ke stafnya. Umumnya, berita yang di-*share* terkait dengan pengaduan. Selain itu, sang diplomat menggunakan pula fasilitas SMS yang menggunakan *provider* umum dan *provider* khusus dengan kriptografi terutama untuk informasi rahasia dengan pejabat khusus.

Selain e-mail yang digunakan dalam pemanfaatan TIK, Kementerian Luar Negeri telah menggunakan pula website yang sejak 2008 telah dibangun dan diharapkan menjadi portal bagi seluruh website perwakilan Indonesia di luar negeri.

Sepanjang 2008–2009, dirasakan oleh para diplomat yang menjadi narasumber penelitian ini bahwa website Kemlu telah cukup banyak dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi. Informasi yang ditampilkan dalam website dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mengikuti perkembangan politik luar negeri dan diplomasi yang dijalankan oleh RI. Mekanisme penerimaan e-mail kepada website Kemlu pun memungkinkan adanya forum tanya jawab antara publik dengan Kemlu. Seorang diplomat di Jakarta bahkan menyatakan bahwa fitur-fitur yang ada di dalam website sangat dimanfaatkan oleh perwakilan RI di negara-negara di dunia.

Meski telah dirasakan fungsinya, namun harapan juga muncul dari diplomat KBRI Thailand dan

diplomat RI lainnya bahwa pemberitaan kegiatan masih cenderung ke arah kegiatan pariwisata dan sosial budaya. Padahal pernyataan pers dan pidato juga dirasakan penting dan perlu ditingkatkan agar dapat menjadi forum bagi penyampaian kebijakan luar negeri RI atas suatu isu.

Seluruh responden penelitian ini mengungkapkan bahwa selaku diplomat RI, mereka mengakses informasi kegiatan diplomasi dengan mengakses website Kemlu dan atau website perwakilan RI di negara-negara lain di dunia. Tentu saja untuk mengetahui kegiatan diplomasi Indonesia dan peristiwa internasional, para diplomat juga mengakses informasi dari sumber lain yang berada di internet. Kuantitas akses website Kemlu RI yang dilakukan oleh para diplomat yang menjadi narasumber adalah sekali sehari sedangkan akses terhadap website perwakilan RI dilakukan hanya apabila diperlukan saja.

Tabel 1.

Matriks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2008–2009)

No	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Diplomasi Indonesia	KBRI A	KBRI B	KBRI C	Direktorat A	Direktorat B
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Standard Operation Procedure (SOP) dalam pemanfaatan TIK	Ya	Ya	Belum Ada	Ya	Ya
3	Pihak yang bertanggungjawab dalam pemanfaatan TIK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Wujud pemanfaatan TIK untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri di era globalisasi	menjawab inquiry masyarakat	promosi seni, budaya dan pariwisata Indonesia di Filipina	informasi dan pelayanan publik	perlindungan dan pelayanan WNI serta program promosi trade, tourism dan investment	informasi dan diplomasi
5	Pemanfaatan TIK berdampak positif terhadap negara-negara anggota ASEAN	Ya karena arus informasi lebih cepat, lebih aman dan lebih luas serta meningkatkan efisiensi kerja	Ya, upaya promosi seni dan budaya menjadi lebih intensif	Ya, diplomasi dengan negara-negara ASEAN menjadi terkoordinasi lebih baik terutama dalam hal memahami pandangan publik mengenai isu tertentu serta menyebarkan informasi mengenai posisi Indonesia pada isu tertentu	Ya, menciptakan kedekatan antara diplomat di negara-negara ASEAN	Ya, informasi mengenai politik luar negeri Indonesia menjadi mudah diakses karena portal telah terintegrasi

Lanjutan Tabel 1.

No	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Diplomasi Indonesia	KBRI A	KBRI B	KBRI C	Direktorat A	Direktorat B
6	Contoh dampak positif yang muncul dari pemanfaatan TIK	Pengisian form visa dilakukan dengan e-mail	Masyarakat setempat memahami dan mengenal Indonesia di bidang sosial dan budaya	Kampanye batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dilakukan melalui website	adanya blog diplomatik dan forum komunitas Indonesia di luar negeri	Forum expatriat pada portal Kemlu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat asing misalnya sebagai fasilitas pengaduan online misalnya oleh Tenaga Kerja Indonesai di luar negeri yang berkasus atau informasi tentang studi di Indonesia
7	Pemanfaatan TIK berdampak negatif terhadap negara-negara anggota ASEAN	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
8	Contoh Dampak negatif dari pemanfaatan TIK	Kemungkinan penyadapan	Tidak ada	apabila pemanfaatan TIK tidak terkendali maka dapat merugikan kepentingan diplomasi Indonesia. Kasus Manohara di mana blogger Malaysia dan Indonesia saling menyerang dan membentuk opini publik mengenai sengketa kasus tersebut	kemungkinan dapat muncul dari jaringan gerakan radikal maupun jaringan teroris di ASEAN sebagai sarana komunikasi internal, eksternal maupun propaganda	tapi perlu diantisipasi kebocoran informasi atau serangan hacker sehingga perlu adanya firewall system untuk sekuriti sistemnya, perlu adanya server back up di tempat lain juga fasilitas disclaimer dalam rangkaantisipasi information obesity
9	Pemanfaatan TIK Kementerian Luar Negeri RI selama periode 2008–2009 mendukung kinerja diplomasi RI terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara	Ya, terutama dalam tawaran beasiswa, pengumuman lomba atau kegiatan	Ya, sangat membantu terutama sebagai salah satu sumber penting informasi dalam upaya menangkali berita-berita negatif mengenai Indonesia	Ya terutama untuk mengetahui informasi dari Jakarta mengenai posisi Indonesia dalam suatu isu dan untuk menunjukkan komitmen pemerintah RI dalam suatu isu kepada negara-negara di Asia Tenggara	Belum sepenuhnya, masih banyak yang perlu ditingkatkan	Ya, sangat mendukung

Berikut hasil wawancara dari kelima narasumber yang telah disusun dalam bentuk matriks:

Meskipun kelima diplomat yang menjadi narasumber memiliki pandangan positif terhadap manfaat dari TIK, namun masih terdapat dua orang diplomat yang menganggap kerja sama dengan negara asing dalam TIK merupakan hal yang sensitif.

Diplomat Indonesia di KBRI Thailand misalnya

berpandangan bahwa pemanfaatan TIK masih merupakan unsur yang sensitif bagi suatu misi diplomatik. Dengan demikian, hal ini tidak dipandang sebagai kerja sama yang baik dengan pihak asing. Bahkan diplomat RI di Jakarta menyarankan agar kerja sama justru dijalin antara Pemerintah dengan swasta. Konteks kerja sama yang dibangun lebih ke arah domestik dulu. Yang telah dilakukan misalnya dalam hal pemanfaatan TIK, BPPK Kemlu

menggunakan *out sourcing* (dengan pihak swasta) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, ketiga narasumber lain berpendapat bahwa kerja sama pemanfaatan TIK dengan pihak asing justru perlu dilakukan antara lain dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian bilateral lainnya. Kerja sama yang telah terjalin antara lain dengan *Microsoft Unified Communication* dalam kegiatan *teleconference*. Sebelumnya Kemlu mengembangkan dan menggunakan *open source*.

Di tingkat ASEAN, seorang narasumber bahkan mengusulkan agar perbaikan infrastruktur IT yang memadai perlu diadakan secara lebih luas di seluruh negara anggota ASEAN. Misalnya, pembentukan ASEAN *Community* 2015 dan dampak pembentukan komunitas tersebut, dapat menjadi contoh bentuk kerja sama yang dapat diterapkan.

Secara khusus, kelima narasumber penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan TIK bagi diplomasi Indonesia terhadap negara-negara Asia Tenggara dipandang perlu memperhatikan beberapa hal penting yaitu menyangkut unsur *political sensitivity*, unsur keamanan, unsur kendala teknis, unsur kerja sama, serta dukungan *people to people contact*.

Beberapa negara anggota ASEAN memiliki *political sensitivity* yang berbeda terhadap pemanfaatan TIK. Misalnya pemerintah Myanmar yang sangat sensitif terhadap TIK. Sebaliknya di negara yang cukup terbuka seperti Singapura, justru website dan e-mail merupakan sumber pertama dan utama bagi publik untuk memperoleh informasi. Website yang ada di Singapura tampak terjaga dengan baik sebab *update* informasi merupakan suatu keharusan di sana.

Dalam hal keamanan, TIK perlu difokuskan kepada kemungkinan kasus penyadapan komunikasi (*bugging*). Menurut narasumber, hal ini pernah menimpa KBRI Myanmar. Dalam hal unsur kendala teknis, kendala *interconnectivity* ASEAN muncul dari kondisi kapasitas jaringan internet di setiap negara yang tidak sama. Selain perbedaan kapasitas antara negara misalnya antara Singapura dengan Myanmar, bahkan menurut seorang narasumber, perbedaan kapasitas pun terjadi intra-negara misalnya antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Contoh kasus kerja sama BIMP-EAGA menunjukkan kendala tersebut. Kendala teknis ini melibatkan Brunei, Indonesia (Kawasan Timur, dari Kalimantan hingga Papua), Malaysia, dan Filipina.

Dalam hal unsur kerja sama, pemanfaatan TIK perlu juga didukung oleh pembentukan wadah

kerja sama negara di Asia Tenggara berupa upaya menyediakan *link* kepada Kemlu dari negara-negara anggota ASEAN. Yang ada hingga saat ini hanya *link* yang terbatas pada lembaga investasi saja.

Meskipun TIK telah dirasakan manfaatnya namun tetap interaksi antara individu (*people to people contact*) masih perlu dilakukan sebab menurut salah seorang narasumber, TIK bukan merupakan satu-satunya alat diplomasi perjuangan kepentingan nasional Indonesia. Pertunjukan seni dan budaya serta pengenalan Bahasa Indonesia melalui program beasiswa dapat menjadi salah satu bentuk *people to people contact* yang dirasakan cukup efektif. Diplomat di ASEAN pun sering kali berkomunikasi secara personal melalui komunikasi internet atau SMS. Hal ini dirasakan cukup efektif. Meski pengiriman dokumen resmi selalu melalui prosedur formal namun pada prakteknya sering kali para diplomat saling mengirim draft dokumen non-rahasia melalui e-mail pribadi atau *e-mail account* kantor.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa; 1) Pemanfaatan TIK dapat dilihat dari aspek kebijakan, perencanaan, kelembagaan, aplikasi, dan infrastruktur 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas diplomasi negara Indonesia dengan negara-negara lain, Kemlu RI telah membuat portal Kemlu yang terintegrasi dengan semua perwakilan RI di seluruh dunia. Portal tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh setiap perwakilan dan secara periode telah dilakukan evaluasi. 3) Setiap perwakilan RI telah memanfaatkan TIK dengan baik, melalui pemanfaatan forum (di portal Kemlu), e-mail, dan fasilitas berbasis lainnya, namun tetap pada aturan sistem keamanan informasi dan kerahasiaan informasi negara. Diplomasi secara virtual cukup berjalan sangat komunikatif dan efisien. 4) Sepanjang tahun 2008–2009, Kemlu telah membuat banyak perubahan dalam pemanfaatan TIK yaitu dengan membuat dan menggunakan portal Kemlu terintegrasi. Hal ini dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata negara-negara lain.

Daftar Pustaka

- Anonim (2003) http://www.indonesiaembassy.org.uk/nnv_2003_02_20.html. Diakses 6 November 2009
- Anonim (2009) <http://nla.gov.au/nla.cat-vn3584027>. Diakses 6 November 2009 approach. Journal of

- Communication Inquiry 30: 102–124.
- Berridge, GR (1995) *Diplomacy, Theory and Practice*. Maryland: Prentice Hall/Harvester Wheatscheaf.
- Brown, R (2004) *Information Technology and Transformation Diplomacy*. [Diakses 6 November 2009]. www.springer.links.com/content.
- Buku Putih Indonesia 2005–2025 Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005–2025 (2006) [Diakses 2 Agustus 2009]. www.kominfo.go.id.
- Calestous, J (2010) The UN's Role in the New Diplomacy, "Issues in Science and concerns. *American Behavioral Scientist* 52 (5): 772–786.
- Dutta, MJ & Bergman, S (2006) *Public diplomacy in the Middle East: a critical cultural*.
- Graffy, C (2009) *Public diplomacy, a practitioner perspective*. *American Behavioral kementerian luar negeri Republik Indonesia (2002–2007)*. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* 23 (1): 1–8.
- Merkel, U (2008) *The politics of sport diplomacy and reunification in divided Korea: One Nation Two Countries and Three Flags* *International Review for the Sociology of Sport* 43 (3): 289–311.
- Neumann, IB (2003) *The English school on diplomacy: scholarly promise unfulfilled*. *International Relations* September 2003 vol. 17(3): 341–370.
- Seib, P (2009) *Public diplomacy and journalism, parallels, ethical issues and practical*. *American Behavioral Scientist* 52(5) 772–786.
- Sekretariat negara. (2007). www.setneg.go.id: <http://www.setneg.go.id/index.php>. Diakses Sept 10, 2009.
- Sugiarto, BA & Hanggarini, P (2010) *Persepsi publik atas kinerja multi jalur diplomasi Technology*. [Diakses 10 April 2010]. <http://find.galegroup.com>.
- Van Ham, P (2003) *War, lies and videotape: Public diplomacy and the USA war on terrorism*. *Security Dialogue* Vol. 34(4): 427–444.